



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026
PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN, PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG
PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
MENDENGAR KETERANGAN AHLI PEMOHON UNTUK
PERMOHONAN 86/PUU-XXIV/2026 DAN 123/PUU-XXIV/2026
SERTA SAKSI PEMOHON UNTUK PERMOHONAN
123/PUU-XXIV/2026 (VII)**

J A K A R T A

SELASA, 30 JUNI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Bernita Matondang, Gabby Mayang Sari, dan Evelyn Amanda

PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Imamudin dan Andru Steven

PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026

- Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Pemohon: Farah Zhafira Azzahra, Jihan Rana Syakira, Irwansyah, Topan Pamungkas, dan Abdul Ramadhan

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli Pemohon untuk Permohonan 86/PUU-XXIV/2026 dan 123/PUU-XXIV/2026 serta Saksi Pemohon untuk Permohonan 123/PUU-XXIV/2026 (VII)

Selasa, 30 Juni 2026, Pukul 15.22 – 15.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Eny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 4) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 5) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 6) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 7) Arsul Sani | (Anggota) |
| 8) Adies Kadir | (Anggota) |
| 9) Liliek Prisbawono Adi | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Saiful Anwar
I Made Gede Widya Tanaya Kabinawa
Nurlidya Stephanny Hikmah

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon Permohonan Nomor 86/PUU-XXIV/2026:**

1. Bernita Matondang
2. Gabby Mayang Sari
3. Evelyn Amanda

B. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 110/PUU-XXIV/2026

1. Viktor Santoso Tandiasa
2. Isam Saifudin

C. Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

1. Abdul Ramadhan
2. Farah Zhafira Azzahra

D. Kuasa Hukum Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

Bernita Matondang

E. Saksi dari Pemohon Permohonan Nomor 123/PUU-XXIV/2026:

Shinta Nurlya Fatmalasari

F. DPR:

1. Trisuharto Clinton
2. Antonius Sam Turnip

G. Pemerintah:

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 2. Muhammad Fuad Muin | (Kementerian Hukum) |
| 3. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 4. Rangga Arif Mahadeli | (Kementerian Hukum) |
| 5. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan | (Kementerian Hukum) |
| 7. Raden Dwi Tiara Lestari | (Kementerian Perdagangan) |
| 8. Ahmad Fauzan Ibrahim | (Kementerian Perdagangan) |
| 9. Ganggas Giandano | (Kementerian Perdagangan) |
| 10. Novia Eska Bunda | (Kementerian Perdagangan) |
| 11. Dedy Januar | (Kementerian Perdagangan) |
| 12. Santhy Yanuar Darma Putri | (Kementerian Perdagangan) |
| 13. Tia Widayanti | (Kementerian Perdagangan) |

14. Cici Sri Suningsih	(Kementerian Kesehatan)
15. Teza Eka Setyawaty	(Kementerian Kesehatan)
16. Yogi Karismawan	(Kementerian Kesehatan)
17. Sri Hastutik Ekowati	(Kementerian Kesehatan)

H. Pihak Terkait:

1. Intan Nur Rahmawanti	(BPKN)
2. Muh. Irsan Sofyan	(BPKN)

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.22 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Permohonan Nomor 86, 110, dan 123 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Diperkenalkan untuk Pemohon 86.

2. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: GABBY MAYANG SARI [00:52]

Ya. Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan dari 86, saya Gabby Mayang Sari, ada Bernita Matondang, dan Evelyn Amanda. Terima kasih.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Dari 110.

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [01:19]

110, hadir Kuasa Hukum, Viktor Santoso Tandiasa dan Isam Saifudin, Yang Mulia. Terima kasih.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:24]

Baik. 123?

6. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: FARAH ZHAFIRA AZZAHRA [01:26]

Untuk 123, Prinsipal Farah Zhafira Azzahra, saya sendiri, kemudian Abdul Ramadhan. Untuk Saksi, kami menghadirkan Shinta Nurly Fatmalasari. Dan Kuasanya, Bernita Matondang.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:40]

Kemudian dari DPR, silakan.

8. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [01:42]

Izin, Yang Mulia, kami berdasarkan penugasan Kepala Badan. Hadir di sini, Antonius Sam Turnip dan sebelah saya, Tisuharto Clinton. Terima kasih.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:52]

Kemudian dari Pemerintah.

10. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:54]

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:58]

Walaikumsalam.

12. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [01:58]

Dari Kuasa Presiden hadir dari 3 kementerian. Dari Kementerian Perdagangan, Santhy Yanuar Darma Putri (Perancang Peraturan Perundang-Undang Ahli Madya) beserta tim. Kemudian dari Kementerian Kesehatan, Cici Sri Suningsih (Analisis Hukum Ahli Madya) beserta tim. Kemudian dari Kementerian Hukum, saya sendiri, Zuliansyah (Direktur Litigasi dan Non-Litigasi), Muhammad Fuad Muin (Plh. Kasubdit Penyiapan Penyelesaian Sengketa PUU Bidang Polkam dan Ekon), beserta tim. Demikian, Yang Mulia.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:29]

Dari BPKN? Tidak ada suaranya.

14. PIHAK TERKAIT BPKN: INTAN NUR RAHMAWANTI [00:00]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari BPKN, hadir Intan Nur Rahmawanti (Wakil Ketua Komisi Advokasi dan Pengaduan) beserta staf Muhammad Irsan Sofyan dari BPKN. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

15. KETUA: SUHARTOYO [03:05]

Baik. Terima kasih. Dari YLKI tidak hadir.

Kemudian agenda persidangan sore ini untuk mendengar keterangan ... seharusnya keterangan ahli dari Pemohon 86 dan 123, tapi ahlinya tidak ada, ya.

16. PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 86/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [03:23]

Betul, Yang Mulia. Untuk ahlinya karena kemarin baru memberikan keterangan tertulis, jadi untuk mempersingkat persidangan, izinkan kami mengiringi ... memberikan keterangan tertulis dari ahli, Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [03:35]

Baik. Kemudian Saksi dari 123 hadir Shinta Nurlya Padmalasari. Silakan, maju ke depan untuk mengucapkan sumpah terlebih dahulu. Agamanya Islam. Mohon Yang Mulia Prof. Guntur berkenan untuk memandu lapar sumpah.

Maju sini!

18. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:05]

Ya, baik. Terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua.

Saudara Shinta Nurlya Fatmalasari sebagai Saksi Pemohon 123. Ikuti lafal sumpah yang saya sampaikan.

"Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

19. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: SHINTA NURLYA FATMALASARI [04:22]

Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan Keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [04:37]

Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Yang Mulia Bapak Ketua.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:39]

Baik, terima kasih, Prof.

Untuk Permohonan Saudara Viktor yang minta dihadirkan dari PERKEMI, Majelis Hakim sudah memutuskan melalui Rapat Hakim.

Bahwa permohonannya sudah dianggap cukup dengan pembuktian yang ada di Sidang Pleno, sehingga dipandang tidak relevan untuk menghadirkan dari PERKEMI untuk ahlinya atau keterangannya. Sehingga dengan fakta-fakta yang ada di persidangan, sudah bisa untuk mengambil putusan nanti.

Silakan, Ibu Saksi, Bu Nurlya Fatmalasari, di podium, waktunya 10 menit.

22. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: SHINTA NURLYA FATMALASARI [05:32]

Assalamualaikum wr. wb.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:35]

Walaikumsalam.

24. SAKSI DARI PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: SHINTA NURLYA FATMALASARI [05:37]

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang Mulia Majelis Hakim Konsti ... Konstitusi, serta Hadirin persidangan yang saya hormati.

Perkenalkan, nama saya Shinta Nurliya Fatmalasari, saya hadir dalam persidangan ini sebagai Saksi dengan latar belakang pekerjaan sebagai staf pada salah satu perusahaan jasa logistik nasional di Indonesia. Saya telah bekerja dan berkecimpung dalam bidang ekspedisi serta pelayanan pengaduan konsumen selama kurang-lebihnya 5 tahun. Dalam pekerjaan tersebut, saya berinteraksi secara langsung dengan berbagai bentuk permasalahan yang dialami konsumen, baik melalui layanan secara daring maupun melalui pengaduan yang disampaikan langsung di kantor operasional kami. Selama kurun waktu tersebut, saya telah menge ... menangani ribuan laporan dan keluhan konsumen yang berkaitan dengan transaksi perdagangan, pengiriman barang, serta sengketa yang muncul akibat aktivitas jual-beli melalui platform digital atau marketplace.

Yang Mulia Majelis Hakim. Pada awal saya bekerja, sebagian besar pengaduan yang masuk hanya berkaitan dengan masalah-masalah logistik yang bersifat teknis, seperti keterlambatan pengiriman, paket hilang, alamat tidak ditemukan, atau kerusakan barang selama proses pengiriman. Namun, dalam 3 sampai 4 tahun terakhir, saya sendiri menyaksikan perubahan pola pengaduan yang sangat signifikan. Saat ini, sebagian besar keluhan yang kami terima justru berasal dari transaksi perdagangan elektronik melalui marketplace. Konsumen datang kepada kami dengan membawa paket yang telah mereka terima dan

mengeluhkan bahwa isi barang yang mereka pesan tidak sesuai dengan yang dijanjikan dalam deskripsi penjualan. Dalam banyak kasus, barang yang diterima memiliki kualitas jauh di bawah spesifikasi yang dijanjikan, berbeda merk, berbeda ukuran, bahkan tidak jarang berisi barang yang sama sekali tidak memiliki nilai yang ekonomis. Saya menyaksikan bagai ... bagaimana konsumen yang telah mengumpulkan uang dalam waktu lama untuk membeli kebutuhan mereka harus mengalami kerugian akibat praktik-praktik yang diduga merupakan penipuan dalam perdagangan elektronik. Banyak di antara mereka adalah masyarakat biasa, mahasiswa, pekerja, ibu rumah tangga, dan kelompok ekonomi menengah ke bawah yang berharap mereka mendapatkan barang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Yang Mulia. Fenomena yang kami sering jumpai itu terjadi menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada periode tersebut, banyak beredar penawaran ... penawaran sembako murah, perangkat elektronik murah, maupun produk-produk rumah tangga dengan harga yang sangat menarik. Konsumen biasanya tertarik karena melihat toko tersebut memiliki penilaian tinggi, jumlah transaksi besar, serta ulasan yang terlihat meyakinkan. Namun, setelah barang diterima dan dibuka, seringkali isinya tidak sesuai dengan apa yang mereka pesan atau yang mereka tawarkan. Dalam beberapa kasus yang saya lihat sendiri, isi paket hanya berupa kardus kosong, batu, kain bekas, botol plastik bekas, atau bahkan barang yang tidak memiliki nilai ekonomis atau sebagaimana yang mereka pesan.

Yang Mulia Majelis Hakim. Saya sebagai pekerja di bidang logistik, seringkali menjadi pihak pertama yang berhadapan langsung dengan kemarahan konsumen. Ketika konsumen merasa dirugikan, pihak yang pertama kali mereka temui adalah kurir yang mengantarkan barang atau petugas kantor ekspedisi di tempat paket tersebut diproses. Tidak jarang juga kurir kami mendapatkan kekerasan verbal atau verbal yang tidak menyenangkan, dimarahi, diteriaki, bahkan dituduh terlibat dalam penipuan tersebut. Dalam beberapa kasus, konsumen datang dengan emosi yang sangat tinggi karena mereka merasa kehilangan uang hasil kerja keras mereka. Padahal secara faktual, perusahaan logistik hanya bertugas mengirimkan barang dari pengirim kepada penerima dan tidak memiliki kewenangan untuk memverifikasi ulang isi barang, memeriksa kebenaran informasi yang dicantumkan, maupun memastikan kesesuaian antara inskripsi produk dan barang yang dikirimkan. Atau dengan kata lain, pekerja logistik memiliki ... menjadi pihak yang turut menanggung dampak sosial dalam lemahnya perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.

Yang Mulia. Hambatan terbesar yang saya lihat di lapangan adalah sulitnya mengidentifikasi dan meminta pertanggungjawaban dari penjual yang melakukan pelanggaran. Dalam banyak kasus, ketika konsumen mencoba meminta pertanggungjawaban, nomor telepon

penjual kebanyakan sudah tidak aktif, alamat yang dicantumkan juga tidak jelas, identitas yang digunakan tidak dapat diverifikasi, atau akun penjual telah ditutup oleh platform marketplace. Akibatnya, konsumen merasa kehilangan arah untuk mencari keadilan. Mereka tidak mengetahui siapa yang harus dimintai pertanggungjawaban. Penjual menghilang, sementara platform marketplace seringkali menyatakan dirinya hanya sebagai perantara transaksi. Situasi tersebut menciptakan kondisi dimana konsumen mengalami kerugian nyata, tetapi tidak memperoleh kepastian hukum mengenai pihak yang bertanggung jawab.

Yang Mulia Majelis Hakim. Dalam praktik sehari-hari, saya juga melihat banyak konsumen mengalami kesulitan ketika menghubungi layanan pelanggan marketplace. Sebagian besar ... sebagian besar layanan pengaduan dilakukan melalui sistem otomatis, chatbot, atau prosedur digital yang panjang dan berlapis. Konsumen seringkali mengeluhkan bahwa mereka tidak dapat berkomunikasi langsung dengan petugas yang memiliki kewenangan mengambil keputusan. Banyak pengaduan berakhir tanpa penyelesaian yang memuaskan karena prosesnya berhenti pada jawaban otomatis atau penolakan administratif. Akibatnya, konsumen merasa bahwa kerugian yang mereka alami tidak memperoleh perlindungan efektif.

Menurut pengamatan saya, kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara perkembangan perdagangan elektronik dengan sistem perlindungan konsumen yang tersedia pada saat ini.

Yang Mulia. Saya juga melihat bahwa permasalahan tersebut bukan lagi kasih ... kasus yang bersifat individual. Keluhan-keluhan serupa muncul berulang-ulang kali dari berbagai daerah dan melibatkan pola yang hampir sama, yaitu penggunaan identitas yang sulit diverifikasi, informasi produk yang menyesatkan, hilangnya akun penjual setelah transaksi, serta kesulitan memperoleh pemulihan kerugian. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa permasalahan yang terjadi bukan hanya sekadar kesalahan teknis dalam transaksi tertentu, melainkan telah berkembang menjadi persalahan yang sistemik dalam perdagangan elektronik. Sebagai orang yang bekerja di ... di lapangan langsung, saya melihat bahwa perlindungan konsumen di area digital tidak dapat lagi hanya dibebankan kepada hubungan antara penjual dan pembeli semata.

Platform marketplace memiliki peran yang sangat besar dalam mempertemukan para pihak, menyediakan sistem pembayaran, mengelola reputasi penjual, mengendalikan akses akun, serta memperoleh keuntungan ekonomi dari setiap transaksi yang terjadi. Karena itu, menurut pengalaman yang saya lihat setiap hari, perlindungan konsumen akan sulit terwujud apabila tidak terdapat mekanisme yang memastikan adanya verifikasi ... verifikasi identitas penjual yang ketat, pengawasan terhadap informasi produk yang

diperdagangkan, serta tanggung jawab yang jelas ketika konsumen mengalami kerugian.

Yang Mulia Majelis Hakim. Melalui Keterangan ini, saya berharap pengalaman yang saya sampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam menilai kondisi nyata yang terjadi dalam praktik perdagangan elektronik saat ini. Saya juga berharap terdapat kepastian hukum yang mampu memberikan perlindungan yang lebih efektif kepada konsumen, memperkuat kewajiban verifikasi identitas pelaku usaha di marketplace, mempersempit ruang bagi pelaku penipuan digital untuk beroperasi, serta juga memberikan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas ketika konsumen mengalami kerugian. Selain itu, saya juga berharap adanya perhatian terhadap keselamatan dan perlindungan pekerja logistik yang selama ini sering menjadi pihak yang pertama menerima dampak langsung dari sengketa transaksi elektronik, meskipun tidak memiliki kendali terhadap isi maupun barang yang diperdagangkan di dalamnya.

Demikian Keterangan ini saya sampaikan berdasarkan apa yang saya lihat, saya dengar, dan saya alami sendiri dalam menjalankan pekerjaan saya sehari-hari.

Terima kasih Yang Mulia. Sekian. Wassalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [14:16]

Walaikumsalam.

Silakan, Pemohon 123. Ada pertanyaan untuk ahli ... untuk Saksi, sori? Cukup?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 123/PUU-XXIV/2026: BERNITA MATONDANG [14:33]

Sudah cukup, Yang Mulia.

27. KETUA: SUHARTOYO [14:35]

Baik, dari DPR ada pertanyaan untuk Saksinya Pemohon 123?

28. DPR: ANTONIUS SAM TURNIP [14:40]

Cukup, Yang Mulia.

29. KETUA: SUHARTOYO [14:41]

Dari Presiden?

30. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [14:52]

Cukup, Yang Mulia.

31. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Dari Majelis Hakim? Cukup.
Baik, terima kasih untuk Saksi, Shinta Nurlya Fatmalasari.
Kemudian dari Presiden, masih akan mengajukan ahli, ya?

32. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [14:56]

Ada, Yang Mulia, dua ahli.

33. KETUA: SUHARTOYO [15:02]

Oke. Baik, diberi waktu untuk dihadirkan di hari Selasa, 7 Juli 2026, pukul 10.30. Keterangan dan CV-nya supaya sudah diterima Mahkamah 2 hari kerja sebelum persidangan, 2 hari kerja, dan jika ada dihadirkan dari pihak kampus harus ada izin dari atasannya.
Baik, terima kasih.

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:26]

Izin, Yang Mulia, untuk 110, apakah bisa masuk ke agenda kesimpulan, Yang Mulia? Karena sudah tidak ada agenda lagi.

35. KETUA: SUHARTOYO [15:34]

Nanti. Karena digabung sih sebenarnya harus bersama-sama.

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERMOHONAN NOMOR 110/PUU-XXIV/2026: VIKTOR SANTOSO TANDIASA [15:39]

Siap, siap.

37. KETUA: SUHARTOYO [15:40]

Tapi, ya, bersama-sama saja nanti, supaya ... meskipun ... ini untuk ahli tiga nomor sekaligus kan?

38. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [15:49]

Ya.

39. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Ahli Presiden?

40. PEMERINTAH: ZULIANSYAH [15:51]

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO [15:50]

Masih ada, Pak Viktor, ya? Oke.

Baik, Selasa, 7 Juli 2026, pukul 10.30 WIB. Agendanya mendengar ahli dari Presiden dua orang untuk tiga nomor sekaligus. Jadi belum dijadwalkan untuk kesimpulan.

Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 15.38 WIB

Jakarta, 30 Juni 2026

Plt. Panitera,

Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

